

OPTIMALISASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENGATASI KEKERASAN DI DALAM SEKOLAH

Dika Maya Putri

Universitas Sebelas Maret

dikamayaputri_98@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mengatasi kekerasan di dalam sekolah melalui optimalisasi pendidikan karakter. Penulisan menggunakan metode studi pustaka dengan menggunakan data sekunder dari KPAI, berita, buku referensi, dan peraturan di dalam konstitusi. Permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan nasional adalah ditemuinya banyak kekerasan yang terjadi di sekolah selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Kekerasan yang ditemui di sekolah ini membutuhkan suatu solusi pemecahan masalah. Dalam penulisan ini penulis menawarkan adanya optimalisasi pendidikan karakter sebagai solusi pemecahan masalah dalam mengatasi kekerasan yang terjadi di sekolah. Penulisan ini digunakan untuk Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 dengan tema "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

Kata Kunci: pendidikan karakter, kekerasan di sekolah

ABSTRACT

This writing aims to explain how to deal with violence in schools through optimizing character education. Writing uses the literature study method using secondary data from the KPAI, news, reference books, and regulations in the constitution. The problem in the implementation of national education is that a lot of violence has occurred in schools over the past few years. Violence encountered in this school requires a problem solving solution. In this paper the author offers an optimization of character education as a solution to problem solving in overcoming violence that occurs in school. This writing was used to postulate the 2019 National Citizenship Education Seminar with the theme "Strengthening Higher Education Citizenship Education, Schooling, and Society in the Disrupted Era"

Keywords: character education, school violence

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pendidikan terintegrasi dalam satu sistem, yaitu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional sendiri diatur dalam konstitusi UU Nomor 20 Tahun 2003. [1] Di dalam undang-undang ini, pada pasal 1 butir 1, menyatakan bahwa pendidikan adalah:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Di dalam pengertian tersebut pendidikan dilaksanakan guna mewujudkan pembelajaran bagi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi mereka agar memiliki kekuatan dalam berbagai aspek baik fisik maupun psikis yang diperlukan bagi dirinya dan orang lain.

Selaras dengan apa yang diungkapkan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

pendidikan, pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [2] juga telah mengamanatkan bahwa negara bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan nasional.

Secara idealnya, pendidikan nasional yang dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Di Indonesia terdapat standar pendidikan nasional yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan [3], yang terdiri antara lain: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan.

Salah satu di antaranya yang terkait dengan bahasan pada penulisan ini adalah Standar Kompetensi Lulusan, di mana di dalamnya memuat sikap yang harus perlu dimiliki pada setiap diri siswa. Secara terperinci hal ini dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kelulusan [4]. Pada jenjang SD Sederajat siswa harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kemudian pada jenjang SMP Sederajat, siswa harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang terakhir pada jenjang SMA Sederajat, siswa harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.

Namun, pada pengimplementasian pendidikan nasional yang dilaksanakan, terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya diharapkan pada konstitusi yang ditetapkan, yakni adanya permasalahan terkait sikap maupun perilaku siswa yang menyimpang dan tidak sesuai dengan karakter baik seperti yang diharapkan. Pelaksanaan pendidikan nasional yang menyimpang serta tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tidak hanya dapat terlihat dari adanya penyimpangan pada perilaku serta sikap siswa saja, namun juga datang dari adanya perilaku menyimpang dari guru atau pendidik yang tidak mencerminkan bagaimana seorang pendidik yang seharusnya.

Dari data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) [5], menunjukkan selama kurun waktu tahun 2011 sampai 2016 terdapat 2496 laporan kasus yang masuk ke KPAI. Dari 2496 kasus yang masuk dalam bidang pendidikan, di antaranya ada laporan mengenai anak yang menjadi korban tawuran, anak pelaku tawuran, anak yang menjadi korban kekerasan (*bullying*), anak yang menjadi pelaku kekerasan di sekolah (*bullying*), dan anak yang menjadi korban kebijakan (pungli di sekolah, penyegehan sekolah, tidak boleh ikut ujian, anak putus sekolah, dsb).

Tabel 1. RINCIAN TABEL DATA KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN
KLASTER PERLINDUNGAN ANAK KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
TAHUN 2011 – 2016 [6]

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
 Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

6	Pendidikan	276	522	371	461	538	328	2496
601	Anak Korban Tawuran Pelajar	20	49	52	113	96	33	
602	Anak Pelaku Tawuran Pelajar	64	82	71	46	126	52	
603	Anak Korban Kekerasan di Sekolah (Bullying)	56	130	96	159	154	97	
604	Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah (Bullying)	48	66	63	67	93	112	
605	Anak Korban Kebijakan (Pungli di Sekolah, Penyegehan Sekolah, Tidak Boleh Ikut Ujian, Anak Putus Sekolah, dsb)	88	195	89	76	69	34	

Dari data yang ditampilkan di atas, dapat dilihat bahwa adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pendidikan nasional di sekolah. Hal ini diperkuat dengan adanya *update* dari KPAI bahwa pada awalan tahun 2019, KPAI mencatat ada 24 laporan kasus yang masuk mengenai kekerasan di sekolah (3 kasus kekerasan fisik, 8 kasus kekerasan psikis, 3 kekerasan seksual, 1 tawuran pelajar, 5 korban kebijakan kasus, serta 1 kasus eksploitasi) (Alian Putra Abdi, 2019) [7].

Fakta tentang adanya kekerasan yang terjadi di sekolah ini menjadi dasar mengapa penulis membuat tulisan ini. Kekerasan yang terjadi adalah bentuk dari penyimpangan terhadap perilaku yang sesuai dengan ketentuan norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki fungsi sebagai

- (1) transmisi dan transformasi kebudayaan, sebagai proses pembudayaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan manusia.
- (2) sekolah dipandang sebagai lembaga yang bertanggung jawab melahirkan manusia sosial.
- (3) membentuk kepribadian sebagai dasar keterampilan.
- (4) mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan.
- (5) membangun integrasi sosial (Hafid, Ahiri, Haq, 2013) [8].

Berdasarkan uraian kutipan di atas, salah satu fungsi sekolah adalah sebagai tempat transmisi dan transformasi pembudayaan sikap. Di mana hal ini selaras dengan fungsi dari pendidikan nasional, yang termuat dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [9], yang mengemukakan: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Sekolah sebagai salah satu tempat (lembaga) penyelenggara pendidikan nasional di Indonesia memiliki fungsi dan tugas untuk mendidik peserta didik agar memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik (berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab) seperti yang dikemukakan pada UU Sistem Pendidikan Nasional. Sekolah yang luput dari tugasnya untuk mendidik para peserta didik mereka untuk menjadi manusia yang berkarakter baik memperlihatkan penyimpangan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional.

Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di sekolah yang ditandai dengan adanya banyak kekerasan yang terjadi, menuntut suatu solusi untuk mengatasinya. Dalam penulisan ini, penulis akan menawarkan suatu pemecahan masalah melalui optimalisasi pendidikan karakter. Penulis menyadari bahwa dalam menangani serta mengatasi kasus kekerasan terdapat beberapa solusi pemecahan masalah yang dapat diambil baik langkah preventif maupun represif baik dengan pemberian hukuman maupun pendidikan. Penulis menjadikan optimalisasi pendidikan karakter sebagai solusi pemecahan masalah dalam mengatasi kekerasan di sekolah karena penulis melihat bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah sejatinya

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

memiliki maksud baik dalam pembentukan karakter siswa. Pendidikan afektif (terdapat pada KI 2 KD 2 pada setiap mata pelajaran dalam kurikulum 2013 yang diterapkan di sekolah) memiliki tujuan agar peserta didik mencapai tingkatan afektif tertinggi yaitu karakter. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Anderson (2010) [10] bahwa tingkatan tertinggi dari aspek pengetahuan Afektif adalah karakter. Namun pada pelaksanaan pendidikan nasional di sekolah belum adanya optimalisasi pendidikan karakter. Ranah afektif belum secara optimal diberikan ditandai dengan adanya kekerasan yang terjadi di sekolah. Hal ini berkaitan dengan apa yang menjadi masalah yang diangkat pada tulisan ini, bahwa belum optimalnya pendidikan karakter di sekolah menjadi salah satu sebab mengapa kekerasan di sekolah masih terjadi.

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

Dalam mengatasi permasalahan yang muncul seperti yang telah dipaparkan di bagian pendahuluan sebelumnya, perlu adanya suatu solusi untuk mengatasi kekerasan yang terjadi di sekolah. Di sini penulis hendak meawarkan sebuah pemecahan masalah, yakni dengan optimalisasi pendidikan karakter. Berikut akan penulis uraikan beberapa pemaparan di bawah ini.

1. Karakter

Sebagai awalan, penulis akan memulai memaparkan dari apa itu karakter. Wynne, mengemukakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani yang artinya "*to mark*" (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari (Mulyasa, 2014) [11]. Menurut Jack Corley dan Thomas Phillip, "karakter adalah sikap dan kebiasaan seseorang yang memungkinkan dan mempermudah tindakan moral" Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter didefinisikan sebagai "sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain" (Samani dan Hariyanto, 2012) [12].

Scerenko berpendapat bahwa karakter didefinisikan sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental seseorang. Mengambil pendekatan yang berbeda, Robert Marine menjelaskan karakter sebagai gabungan yang samar-samar antara sikap, perilaku bawaan, dan kemampuan yang membangun pribadi seseorang (Samani dan Hariyanto, 2012) [13].

Menurut Aristoteles, karakter yang baik ialah kehidupan dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan dirinya dan orang lain. Sedangkan, Michael Novak menyatakan karakter sebagai "campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan kaum orang berakal sehat yang ada dalam sejarah (Lickona, 2012) [14].

Lebih lanjut lagi, Lickona (2012) [15]. dalam bukunya menjelaskan karakter terdiri dari nilai operatif, nilai dalam tindakan. Kita berproses dalam karakter kita, seiring suatu nilai menjadi suatu kebaikan, suatu disposisi batin yang dapat diandalkan untuk menanggapi situasi sesuai moral yang baik. Di dalam karakter yang baik terdapat tiga bagian yang saling berhubungan yakni pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri atas mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik. Kebiasaan dalam tindakan, kebiasaan dalam hati, serta kebiasaan dalam perasaan. Lickona mengklasifikasikan komponen dari ketiga bagian tersebut.

- Pengetahuan Moral

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

- a) Kesadaran moral
- b) Pengetahuan nilai moral
- c) Penentuan perspektif
- d) Pemikiran moral
- e) Pengambilan keputusan
- Pengetahuan pribadi
 - a) Perasaan Moral
 - b) Hati nurani
 - c) Harga diri
 - d) Empati
 - e) Mencintai hal yang baik
 - f) Kendali diri
 - g) Kerendahan hati
- Tindakan moral
 - a) Kompetensi
 - b) Keinginan
 - c) Kebiasaan

Dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa karakter adalah suatu nilai baik yang ada di dalam diri yang diwujudkan dalam perilaku, tindakan, kebiasaan pada setiap diri yang membentuk dan menjadi ciri seseorang yang membedakan dengan orang lain. Suatu karakter yang baik, terdapat bagian yang saling berhubungan di dalamnya yakni: pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral.

2. Pendidikan Karakter

Lickona (2012) [16] mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan nilai-nilai etis. Sederhananya, pendidikan karakter adalah sebuah usaha yang dilakukan secara terencana untuk memperbaiki karakter. Anne Lockwood (Samani dan Hariyanto, 2012) [17] mengemukakan bahwa (1) pendidikan karakter tidak semata menjadi sebuah kurikulum tersembunyi namun telah menjadi konsensus bersama yang telah mendapat dukungan dari masyarakat. (2) tujuan behavioral tersebut adalah bagian dari pendidikan karakter. (3) perilaku antisosial anak adalah hasil dari ketiadaan nilai-nilai dalam pendidikan.

Di Indonesia, pendidikan karakter telah menjadi bagian dari pendidikan nasional. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam fungsi pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [18]. Dinyatakan bahwa, "pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Pendidikan karakter yang telah menjadi bagian dari pendidikan nasional diwujudkan dalam kurikulum yang berlaku pada pendidikan nasional di Indonesia. Pada kurikulum terbaru Indonesia, yakni kurikulum 2013, aspek karakter tertuang pada KI 2 dan KD 2 pada ranah afektif yang diatur dalam Permendikbud No 24 Tahun 2016 mengenai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar [19].

3. Optimalisasi Pendidikan Karakter

Sekolah sebagai tempat untuk pelaksanaan pendidikan karakter perlu lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan pendidikan karakter bagi peserta didik. Hal ini memiliki alasan mendasar seperti: (1) banyak keluarga tidak lagi bisa dijadikan tempat pendidikan karakter utama. (2) selain bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik, sekolah juga bertujuan untuk membentuk peserta didik yang baik. (3) kecerdasan peserta didik hanya akan bermakna jika dilandasi oleh kebaikan. (4) pendidikan karakter tidak hanya sekadar tugas tambahan guru, namun juga sudah menjadi sebuah tanggung

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

jawab yang melekat dan diemban oleh seorang guru (Saptono, 2011) [20].

Lickona (1996) menyatakan bahwa setidaknya ada sebelas prinsip yang hendaknya diterapkan sekolah yang hendak melaksanakan pendidikan karakter. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a) Sekolah harus berkomitmen pada nilai-nilai etis inti.
- b) Karakter harus dipahami secara utuh, mencakup pengetahuan atau pemikiran, perasaan, dan tindakan.
- c) Sekolah harus bersikap proaktif dan bertindak sistematis dalam pembelajaran karakter dan tidak sekadar menunggu datangnya kesempatan.
- d) Sekolah harus membangun suasana saling memperhatikansatu sama lain dan menjadi dunia kecil (mikrokosmos) mengenai masyarakat yang saling peduli.
- e) Kesempatan untuk mempraktikkan tindakan moral harus bervariasi dan tersedia untuk semua.
- f) Studi akademis menjadi hal utama.
- g) Sekolah perlu mengembangkan cara-cara meningkatkan motivasi instrinsik siswa yang mencakup nilai-nilai inti
- h) Sekolah perlu bekerja bersama dan mendialogkan norma mengenai pendidikan karakter.
- i) Guru dan siswa harus berbagi kepemimpinan moral sekolah.
- j) Orang tua dan masyarakat harus menjadi rekan kerja dalam pendidikan karakter di sekolah.
- k) Melakukan evaluasi mengenai efektivitas pendidikan karakter di sekolah terutama terhadap guru, karyawan, serta siswa (Saptono, 2011) [21].

Dalam pendidikan karakter setidaknya mengolah tiga aspek sekaligus, yakni: pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), tindakan moral (*moral*

action) (Lickona 1991) [22]. Ketiga aspek tersebut saling terkait satu sama lain. Ketiganya bekerja secara bersama dan saling terkait, ketiga aspek tersebut perlu diimplementasikan ke dalam sebuah desain komprehensif. Desain ini memiliki beberapa tuntutan kepada guru (Lickona, 1991) yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Guru bertindak sebagai sosok yang peduli, sebagai model, dan sebagai mentor.
- b) Guru menciptakan komunitas moral di kelas.
- c) Guru mempraktikkan disiplin kelas.
- d) Guru menciptakan lingkungan kelas yang demokratis.
- e) Guru mengajarkan nilai-nilai melalui kurikulum.
- f) Guru menggunakan pembelajaran kooperatif.
- g) Guru membangun kepekaan nurani.
- h) Guru mendorong refleksi moral.
- i) Guru mengajarkan resolusi konflik. [23]

Dalam pengoptimalan pendidikan karakter, guru sebagai pemegang peran yang besar karena guru adalah sebagai pihak yang berperan memberikan pendidikan kepada siswa, yang di dalam pelaksanaannya seorang guru mengemban peran tidak hanya mendidik kemampuan pengetahuan siswa tetapi juga mendidik karakter siswa agar terwujud karakter baik sesuai yang diharapkan.

Kemudian strategi yang dituntut kepada sekolah antara lain:

- a) Mengembangkan sikap peduli yang tidak hanya sebatas kegiatan sekolah, yang pada intinya sekolah mengajak siswa untuk peduli dengan cara mengajak untuk bertindak peduli.
- b) Menciptakan budaya moral yang positif di sekolah; melalui kepemimpinan kepala sekolah, disiplin sekolah, rasa kekeluargaan

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

sekolah, keterlibatan siswa secara demokratis, guru dan karyawan, serta waktu yang digunakan untuk membicarakan keprihatinan moral yang membantu menguatkan pembelajaran nilai-nilai yang berlangsung di kelas.

- c) Melibatkan orang tua siswa dan masyarakat sebagai *partner* dalam pendidikan karakter.

Di sekolah, pihak di dalamnya seperti guru dan karyawan serta siswa menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter (Lickona, 2004) [24]. Ketiga pihak tersebut di dalam sekolah harus berkomitmen menjadikan diri mereka sebagai pihak yang senantiasa menumbuhkan, mengembangkan, dan mengoptimalkan pelaksanaan karakter yang dilakukan oleh ketiga pihak tersebut.

Kepada pihak guru dan karyawan perlu dikenalkannya pendidikan karakter. Di sini, guru dan karyawan diajak untuk turut ambil peran dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Selain itu, melakukan analisis budaya moral dan intelektual di sekolah terhadap hal-hal seperti: pengalaman positif (pengalaman yang diberikan pendidik kepada siswa), kelalaian (pengalaman penting apa yang belum diberikan kepada siswa), titik masalah (perilaku buruk siswa guru, dan karyawan yang tidak ditangani secara memadai), inkonsistensi (apa saja tindakan sekolah yang bertentangan dan tidak sesuai dengan karakter baik dan yang hendak dikembangkan sekolah). Kepada siswa, sekolah perlu melibatkan siswa dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan karakter di sekolah. memberi kesempatan siswa untuk mengungkapkan aspirasinya. Melibatkan siswa agar dapat membangun norma positif yang dapat memberi dampak positif kepada teman sebaya mereka. Memberi penghargaan

kepada siswa atas kontribusi yang mereka berikan. (Saptono, 2011). [25]

SIMPULAN DAN PENUTUP

Optimalisasi pendidikan karakter di sekolah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi dan mencegah dan menghindari adanya kekerasan yang terjadi di sekolah. penulis berpendapat kekerasan yang marak terjadi seperti yang telah dikuatkan melalui data dari KPAI yang dicantumkan di atas, karena kurang optimalnya pelaksanaan pendidikan karakter dalam pelaksanaan pendidikan nasional di sekolah.

Penulis menyadari bahwa dalam menangani serta mengatasi kasus kekerasan terdapat beberapa solusi pemecahan masalah yang dapat diambil baik langkah preventif maupun represif baik dengan pemberian hukuman maupun pendidikan. Penulis menjadikan optimalisasi pendidikan karakter sebagai solusi pemecahan masalah karena sekolah sebagai tempat (lembaga) penyelenggara pendidikan nasional mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadikan peserta didik warga negara yang berkarakter baik.

Dengan adanya kerja sama antara berbagai pihak (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, masyarakat) yang turut berperan dalam pelaksanaan pendidikan karakter, pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan secara optimal. Hal ini yang mana akan berdampak baik dengan terwujudnya karakter baik peserta didik, selaras dengan kekerasan di sekolah dapat diatasi sehingga ke depannya kekerasan di sekolah dapat dihentikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1], [9], [18] UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [2] UUD NRI 1945
- [3] UU No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
- [4] Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kelulusan

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

- [5], [6] KPAI. 2016. *RINCIAN TABEL DATA KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASER PERLINDUNGAN ANAK KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TAHUN 2011 – 2016*. Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.
Link: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/1260/data-pengaduan-komisi-perlindungan-anak> (diakses: 7/5/2019 pukul 21.04)
- [7] Abdi, Alian Putra. 2019. *KPAI: 24 Kasus Anak di Sekolah pada Awal 2019 Didominasi Kekerasan*. Tirto.id
Link: <https://tirto.id/kpai-24-kasus-anak-di-sekolah-pada-awal-2019-didominasi-kekerasan-dg8o> (diakses: 7/5/2019 pukul 21.04)
- [8] Hafid, Anwar; Ahiri, Jafar; Haq, Pendaiz. 2013. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. Badung: Alfabeta.
- [10] Anderson, L; Krathwohl, D. 2010. *Kerangka Dasar untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom*. Yogyakarta: Pustaa Pelajar
- [11] Mulyasa. 2014. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [12], [13], [17] Samani, Muchlas; Hariyanto. 2012. *Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [14], [15], [16] Lickona, Thomas. 2012. *Educating or Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [19] Permendikbud No 24 Tahun 2016 mengenai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
- [20], [21], [25] Saptono. 2011. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, Strategi, Langkah Praktis*. Jakarta: Esensi, Erlangga Grup.
- [22] [23] Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character*. New York: Bantam Books.
- [24] Lickona, Thomas. 2004. *Characters Matters*. New York: Simon & Schuster.